BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perusahaan perlu menerapkan tata kelola yang baik, sehingga masyarakat dapat memilih layanan dan informasi yang terbaik. Setiap organ perusahaan harus menjalankan peranannya sehingga penyalahgunaan atau pemberian layanan dan informasi yang tidak berkualitas dapat dihindari. Dalam organ perusahaan, fungsi pengawasan dan pengelolaan harus dilakukan, dimulai dari pemetaan kebutuhan bisnis, perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan secara berkelanjutan. Secara umum, Tata Kelola Perusahaan merupakan suatu metode dalam mengatur perusahaan layaknya mengatur suatu bangsa atau negara yang berdaulat agar tetap mengikuti undang-undang ataupun kebijakan pada perusahaan tersebut, baik itu dari tingkat tertinggi maupun tingkat terendah. Prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada era digital ini tentunya bukan hanya lagi merupakan alat bantu kerja, namun telah masuk ke dalam ranah strategi bisnis, sehingga pengambilan keputusan dan pengawasan pun telah menjadi agenda penting yang dibicarakan dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris perusahaan. Tata Kelola yang baik merupakan kebutuhan bisnis untuk memastikan dapat mendukung tujuan dan kebutuhan bisnis perusahaan.

Tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) akan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham secara berkelanjutan dalam jangka panjang, dengan tetap menghormati kepentingan pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan hukum dan norma yang berlaku dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan peraturan Nomor : 21/POJK.04/2015 (2015) mengemukakan bahwa Pengaturan tata kelola perusahaan dengan pendekatan "Terapkan atau Jelaskan" (*Comply or Explain*) diharapkan dapat mendorong Perusahaan Terbuka untuk melakukan praktik-praktik tata kelola perusahaan yang baik. Peningkatan penerapan tata kelola perusahaan oleh Perusahaan Terbuka juga sangat diperlukan dalam menyongsong masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) 2015, sehingga tingkat tata kelola Perusahaan Terbuka setidaknya dapat disejajarkan dengan tata kelola

perusahaan di negara ASEAN lainnya. Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso mengungkapkan, hanya dua emiten dari Indonesia yang masuk dalam daftar 50 Emiten Terbaik dalam Praktik GCG di ASEAN dalam ajang penganugerahan ASEAN *Corporate Governance Awards* 2015 yang diselenggarakan oleh ASEAN *Capital Markets Forum* (ACMF) di Manila, Filipina. Kedua emiten tersebut yaitu PT Bank Danamon Tbk dan PT Bank CIMB Niaga Tbk (CNN, 2017).

Selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, istilah *Good Corporate Governance* (GCG) kian populer, karena *Good Corporate Governance* merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang yang sekaligus dapat memenangkan persaingan bisnis global, karena para *stakeholder* meyakini bahwa dengan adanya pengungkapan *good corporate governance* yang akurat, tepat waktu dan transparan dapat menambah nilai bagi para *stakeholder* (Sadi, 2016:40).

Setiap tahun laporan keuangan tahunan perusahaan harus diaudit oleh auditor eksternal yang ditunjuk oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh dewan komisaris dan komite audit. Komite Audit adalah suatu komite independen yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh direksi/manajemen. Dalam menjalankan fungsi pengawasan ini, Komite Audit berhubungan dengan pihak manajemen, auditor internal perusahaan, dan auditor eksternal. Komite Audit merupakan bagian dari *good corporate governance* yang sangat penting sebagai salah satu organ pendukung.

Hubungan auditor internal terhadap *good corporate governance* dapat berperan dalam terwujudnya *good corporate governance* di perusahaan dikemukakan oleh Arief Effendy (2016:146), beberapa hal yang perlu mendapat dukungan penuh dari auditor internal seperti, mendorong transparansi dan integritas dalam pelaporan keuangan perusahaan, mendorong akuntabilitas dalam pengelolaan asset perusahaan, mendorong pertanggungjawaban perusahaan kepada publik melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR), *community development*, atau Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), mendorong

indenpendensi perusahaan terhadap pihak-pihak terkait, termasuk pemegang saham minoritas, dan mendorong kewajaran dalam pengadaan barang dan jasa termasuk dipastikannya tidak ada pelanggaran terhadap UU anti monopoli dan persaingan usaha yang sehat.

PT. Kereta Api Indonesia (KAI) Persero salah satu contoh kasus yang menunjukkan bagaimana proses tata kelola yang dijalankan dalam suatu perusahaan, dan bagaimana peran dari tiap-tiap organ pengawas dalam memastikan penyajian laporan keuangan tidak salah saji dan mampu menggambarkan keadaan keuangan perusahaan yang sebenarnya. Berawal dari perbedaan pandangan antara manajemen dan komisaris, khususnya ketua komite audit dimana komisaris menolak menyetujui dan menandatangani laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor eksternal dan komisaris meminta untuk dilakukan audit ulang agar laporan keuangan dapat disajikan secara transparan dan sesuai dengan fakta yang ada. Terlepas dari pihak mana yang benar, permasalahan ini tentunya didasari oleh tidak berjalannya fungsi *check and balance* yang merupakan fungsi substantif dalam perusahaan. Yang terpenting adalah mengidentifikasi kelemahan yang ada sehingga dapat dilakukan penyempurnaan untuk menghindari munculnya permasalahan yang sama di masa yang akan datang.

Kasus PT. KAI menarik untuk dicermati karena kasus ini dapat terjadi di perusahaan lainnya. Sebagai perusahaan BUMN yang bergerak di bidang pelayanan publik, PT KAI memiliki *business environment* yang berbeda dengan perusahaan lainnya dan merupakan pembelajaran yang menarik bagi perusahaan lainnya terutama mengenai bagaimana mambangun pengawasan yang efektif.

PT Pindad (Persero) merupakan salah satu contoh perusahaan BUMN di Indonesia yang juga memiliki *business environment* yang berbeda dengan perusahaan lainnya yang telah memiliki dan memfungsikan Komite Audit dan Audit Internal dalam menerapkan pengawasan praktik *good corporate governance*. Dengan memfungsikan peran Komite Audit dan Audit Internal secara efektif terhadap penerapan *good corporate governance*, kasus yang pernah terjadi pada PT. KAI dapat dihindari. Maka peneliti tertarik untuk membahas lebih

mendalam dengan judul **"Pegaruh Peran Komite Audit dan Audit Internal terhadap Penerapan *Good Corporate Governance* di PT Pindad (Persero)"**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti ingin merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah peran komite audit berpengaruh terhadap penerapan *good corporate governance* di PT Pindad (Persero)?

2. Apakah peran audit internal berpengaruh terhadap penerapan *good corporate governance* di PT Pindad (Persero)?

3. Apakah peran komite audit dan audit internal secara bersama-sama berpengaruh terhadap *good corporate governance* di PT Pindad (Persero)?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh peranan komite audit terhadap penerapan *good corporate governance* di PT Pindad (Persero)

2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh peranan audit internal terhadap penerapan *good corporate governance* di PT Pindad (Persero)

3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh peranan komite audit dan audit internal secara bersama-sama terhadap penerapan *good corporate governance* di PT Pindad (Persero)

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh melalui penelitian ini, yaitu:

1. Bagi Lembaga STEI Indonesia

   Penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan bahan rujukan untuk mengetahui tentang bagaimana praktik *good corporate governance* yang baik serta pengaruh peran komite audit dan audit internal suatu perusahaan dalam mendukung dan meningkatkan kualitas *good corporate governance*.

2. Bagi Perusahaan

   Penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk membuat atau mengkaji kebijakan-kebijakan tata kelola perusahaan yang lebih efektif, efisien, dan ekonomis khususnya terhadap komite audit dan audit internal perusahaan PT. Pindad (Persero).

3. Bagi penelitian selanjutnya

   Penulisan ini diharapkan dapat membantu peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitiannya serta dapat mendorong peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai peranan komite audit dan audit internal dalam penerapan *good corporate governance*.